



## Pentingnya Pengetahuan Pemenuhan Hak Dasar Balita dalam Situasi Darurat Bencana Kebakaran di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah

Nurbaiti<sup>1</sup>, Ekayanti Hafidah Ahmad<sup>2</sup>, Erna Kasim<sup>3</sup>, Kamaria S. Ahmad<sup>4</sup>, Elawati Pakuku<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Prodi D3 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar

\*Korespondensi penulis, email : [nurbaitimkes@yahoo.com](mailto:nurbaitimkes@yahoo.com)

### Article History:

Received: Februari 15, 2021

Accepted: Maret 15, 2021

Published: April 30, 2021

**Keywords:** Basic Rights of Toddlers, Fire Disaster

**Abstract:** Various disasters that frequently occur in Indonesia have caused various losses and disasters for disaster victims and survivors. This service aims to examine the fulfillment of basic health needs for people who have children under five in the Maccini Sawag Community Health Center Work Area. Questionnaires and interviews were distributed to various stakeholders and the community. Disasters that frequently strike South Sulawesi Province have a high disaster vulnerability index and disasters with a high frequency of occurrence such as: fires, floods and prolonged drought. This activity was carried out on January 14 2021, which was attended by 25 families. The results of the activity show that families think that fulfilling the needs of families with toddlers has been carried out well. Likewise, basic fulfillment indicators such as clothing, food, clean water and sanitation needs, health services, psychosocial services and shelter and shelter have been met well or at least quite well. Various government programs and community participation have also been carried out to ensure that disaster survivors have their health needs met properly.

### ABSTRAK

Berbagai kejadian bencana yang kerap terjadi di Indonesia telah menimbulkan berbagai kerugian dan malapetaka bagi para korban dan penyintas bencana. Pengabdian ini bertujuan untuk menelaah pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan bagi para masyarakat yang memiliki balita di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawag Penyebaran kuesioner dan wawancara dilakukan kepada berbagai *stakeholder* dan masyarakat. Bencana yang kerap melanda Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai indeks kerawanan bencana yang tinggi dan bencana dengan frekuensi kejadian yang tinggi seperti: Kebakaran, banjir, dan kemarau berkepanjangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021 yang diikuti oleh 25 keluarga. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keluarga beranggapan pemenuhan kebutuhan bagi para keluarga yang memiliki balita telah dilakukan dengan baik. Begitu juga indikator pemenuhan dasar seperti sandang, pangan, kebutuhan air bersih, dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian telah dipenuhi dengan baik atau minimal cukup baik. Berbagai program pemerintah dan partisipasi masyarakat juga telah dilakukan untuk memastikan bahwa para penyintas bencana telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan di bidang kesehatan dengan baik.

**Kata Kunci :** Hak Dasar Balita, Situasi Darurat Bencana Kebakaran

### PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan situasi yang gawat dan mengakibatkan penderitaan bagi manusia. Manusia dianggap tidak berdaya pada bencana alam, bahkan sejak awal peradabannya. Ketidakberdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen darurat menyebabkan kerugian dalam berbagai bidang seperti bidang keuangan, struktural, dan

\*Nurbaiti, [nurbaitimkes@yahoo.com](mailto:nurbaitimkes@yahoo.com)

korban jiwa. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan manusia untuk mencegah dan menghindari bencana serta daya tahannya. Menurut (Suryani. Anih Sri, 2012) “bencana muncul bila bertemu dengan ketidakberdayaan”. Dengan demikian aktivitas alam yang berbahaya dapat berubah menjadi bencana alam apabila manusia tidak memiliki daya tahan yang kuat. Risiko kematian, risiko cedera, risiko penularan penyakit, kehilangan tempat tinggal, kekurangan bahan makanan, dan minimnya layanan kesehatan dasar saat bencana cukup tinggi. Moe, Tun Lin, Pathranarakul P., 2016)

Bencana demi bencana yang terjadi di Indonesia tentu membutuhkan penanganan yang baik, agar masyarakat yang tertimpa bencana mampu bangkit kembali. Terlepas dari perdebatan mengenai bencana alam yang juga merupakan dampak dari buruknya hubungan manusia dengan alam, ada poin penting yang sangat mengkhawatirkan dalam rangkaian bencana ini, yaitu sektor penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana di berbagai pelosok Nusantara beberapa tahun terakhir, pemerintah tampak kewalahan. Alasan klasik seperti minimnya peralatan dan sarana pemenuhan kebutuhan korban bencana selalu muncul. Misalnya, dalam kasus banjir pemerintah selalu beralasan kekurangan perahu karet, minimnya pasokan kebutuhan pengungsi, ketiadaan genset cadangan, dan berbagai kendala lain. (P3DI dan Azza Grafika, 2019)

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Indonesia memiliki 12 jenis ancaman bencana yang berisiko tinggi, yakni: (1) gempa bumi, (2) tsunami, (3) letusan gunung berapi, (4) gerakan tanah (tanah longsor), (5) banjir, (6) banjir bandang, (7) kekeringan, (8) cuaca ekstrim, (9) gelombang ekstrim dan abrasi, (10) kebakaran hutan dan lahan, (11) epidemi dan wabah penyakit, dan (12) gagal teknologi. Di samping bencana geologis, bencana lain yang akhir-akhir ini melanda berbagai wilayah di Indonesia secara rutin adalah bencana kebakaran yang disebabkan oleh kepadatan jumlah pemukiman termasuk di kota makassar dan masyarakat yang paling terkena dampaknya terutama anak-anak dan ibu hamil. (Hidayat, Bambang, 2020)

Pada beberapa kasus kebencanaan, penderitaan korban makin bertambah karena kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, dan papan tidak terpenuhi, walaupun bantuan berupa makanan dan layak pakai telah disiapkan baik oleh pemerintah maupun dari warga lainnya, namun tidak dapat sampai ke korban. Penyebab utamanya adalah akses jalan yang terganggu, sehingga barangbarang bantuan tersebut tidak dapat didistribusikan kepada para korban dan penyintas bencana. Persediaan pangan yang tidak mencukupi berdampak pada penurunan derajat kesehatan dalam jangka panjang dan memengaruhi secara langsung

tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana. Demikian juga dengan tempat pengungsian. Tempat tinggal sementara para korban bencana (*shelter*) sering kali tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan daya tahan tubuh dan bila tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan masalah di bidang kesehatan. (Glover, David, Timothy Jessup., 2012)

Sementara itu, pemberian pelayanan kesehatan pada kondisi bencana sering menemui banyak kendala akibat rusaknya fasilitas kesehatan, tidak memadainya jumlah dan jenis obat serta alat kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan dana operasional. Kondisi ini tentunya dapat menimbulkan dampak lebih buruk bila tidak segera ditangani (Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan, 2001 dalam Fatoni 2015). Bencana menimbulkan berbagai potensi permasalahan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Dampak ini akan dirasakan lebih parah oleh kelompok penduduk rentan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kelompok rentan meliputi: 1). Bayi, balita, dan anak-anak; 2). Ibu yang sedang mengandung atau menyusui; 3). Penyandang cacat; dan 4) Orang lanjut usia. Selain keempat kelompok penduduk tersebut, dalam Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar ditambahkan 'orang sakit' sebagai bagian dari kelompok rentan dalam kondisi bencana. Anak - anak dan perempuan adalah kelompok paling rentan mengalami trauma pascabencana. Selain kejadian bencana itu sendiri, kondisi posko pengungsian yang minim fasilitas dan tidak ada hiburan cenderung membuat anak berada dalam keadaan depresi dan stres. Anak-anak membutuhkan kekuatan mental yang lebih ketimbang orang dewasa dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka pelaksanaan pendampingan ini menalami satu siklus. Dapat disimpulkan bahwa pendampingan keluarga siaga bencana pada masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah sangat efektif dalam menanggulangi peristiwa kebencanaan atau kesiapsiagaan bencana yang akan terjadi (Fauzi & Handayani, 2021). Kesiapan merupakan langkah penting sebelum bencana itu terjadi sehingga pengabdian ini menjadi langkah yang tepat dengan memberikan berbagai peran dalam tindakan sehingga tidak menunggu untuk siapa akan melakukan apa dan bagaimana melakukannya. Oleh sebab itu pentingnya peningkatan pengetahuan tentang pemenuhan Hak Dasar Balita dalam Situasi Darurat Bencana Kebakaran sangat perlu dilakukan.

## METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan menggunakan metode partisipatif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada upaya peningkatan peran serta masyarakat secara langsung dalam proses pelaksanaan dilapangan terlebih masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di rumah salah satu kader kesehatan pada hari kamis, 14 Januari 2021 pukul 13.00 – 15.00 Wita yang diikuti oleh 25 keluarga. Dalam kegiatan tersebut, pengabdian menawarkan solusi bersama untuk melaksanakan simulasi bencana kebakaran. Harapan dari kegiatan ini adalah :

1. Peserta memahami tentang paradigma penanggulangan bencana, pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam konsep tanggap bencana.
2. Peserta memahami kebijakan terkait struktur dan sistem penanggulangan bencana di Indonesia.
3. Peserta memahami sektor-sektor kunci dalam Penanggulangan Bencana.
4. Peserta dapat memetakan sistem koordinasi sektor-sektor kunci dalam Penanggulangan Bencana.
5. Peserta memahami isu perlindungan dalam penanggulangan bencana khususnya pada balita.
6. Peserta memahami mekanisme koordinasi klaster pengungsian dan perlindungan di kawasan.
7. Peserta dapat mensimulasikan koordinasi *cluster*.

Adapun tahap kesiapan mengembangkan kemampuan meningkatkan keterampilan diri seperti:

### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilaksanakan survey lokasi dan kordinasi dengan peserta untuk menentukan tempat pelaksanaan kegiatan. Dan izin lokasi beserta mekanisme acara untuk mematuhi protocol kesehatan, kegiatan dilaksanakan di rumah kader kesehatan dengan jumlah peserta yaitu 25 Peserta

### 2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis pukul 13:00 – 15. 00 Wita . Peserta yang ikut kegiatan pelatihan pembuatan desain program dan metode pelaksanaan

### 3. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini dilaksanakan evaluasi dengan meminta tanggapan atau kesan peserta terhadap kegiatan pelatihan pembuatan.

## HASIL

Kegiatan Edukasi pentingnya pengetahuan pemenuhan hak dasar Balita dalam Situasi Darurat Bencana Kebakaran yang dilaksanakan di rumah salah satu kader Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah pada hari Kamis, 14 Januari 2021 pukul 13.00 – 15.00 Wita yang diikuti oleh 25 keluarga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik, dimana masyarakat mengikuti kegiatan secara tertib dan antusias. Walaupun halaman rumah kader kesehatan tidak begitu luas, namun cukup mampu untuk menampung masyarakat yang datang.

Tabel. Hasil Pengukuran pengetahuan tentang pentingnya pemenuhan hak dasar balita dalam situasi darurat bencana kebakaran

Pengetahuan	Pre Test		Post Tes	
	F	%	f	%
Baik	4	16,00	23	92,00
Kurang	21	84,00	2	8,00
Total	25	100	25	100

Berdasarkan tabel tersebut maka hasil pre test menunjukkan bahwa pengetahuan kurang yaitu 21 orang (84,00%) dan yang memiliki pengetahuan baik hanya 4 orang (16,00%), sedangkan hasil post test menunjukkan bahwa pengetahuan kurang yaitu 2 orang (8,00%) dan pengetahuan baik yaitu 23 orang (92,00%).



Gambar. Dokumentasi Kegiatan

## DISKUSI

Upaya percepatan penanganan bencana dapat dilakukan dengan adanya partisipasi publik dan keterlibatan pemerintah lintas sektor. Misalnya, pada prabencana masyarakat kurang berperan dalam pencegahan terjadinya kebakaran. Partisipasi masyarakat saat terjadi bencana dinilai cukup baik dan antusiasmenya tinggi. Bentuk partisipasi masyarakat berupa keterlibatan mereka dalam pemberian informasi, evakuasi maupun bantuan pendanaan. Tetapi mengingat adanya kepanikan para penyintas bencana menyebabkan kesulitan koordinasi dan pendistribusian bantuan. Pendataan sebelum terjadi bencana memegang peranan penting sehingga upaya perhitungan, penyaluran bantuan, dan pertolongan kepada korban lebih cepat dilakukan. Seperti halnya penanganan bencana lain, peranan kebijakan daerah mampu memberikan kepastian tugas. Kebijakan daerah telah dituangkan dengan jelas, termasuk tugas dari masing-masing instansi terkait (Haryanto, Agus Joko, 2012). Namun dinilai masih terkendala dalam implementasinya. Terutama dalam hal koordinasi ketika tidak terjadi bencana. Koordinasi akan lebih cepat terjalin ketika ada kesamaan masalah di antara anggota satlak dan masyarakat. Namun kebijakan yang ada kurang mengakomodir kegiatan prabencana dan pascabencana, serta kurang aspiratif dalam masalah pendanaan. (Dunn, William, 2013)

Kegiatan edukasi yang dilakukan dianggap dapat meringankan beban psikologis, mengembalikan keceriaan anak dan sekaligus sebuah model terapi bagi korban yang mengalami trauma psikologis yang mendalam. (Setiono, Kusdwiratri, Johan S. Masjur, Anna Alisyahbana, 2017) Keluarga merupakan solusi tepat untuk memberikan respon terhadap kekhawatiran dampak negatif dari bencana dan usaha-usaha pemulihan psikososial yang lain. Program lingkungan aman dapat dijadikan model bagi relawan dan pengambil kebijakan di masa tanggap darurat untuk mengatasi dampak kerawanan yang ditimbulkan dari bencana. Di samping itu konsep lingkungan aman dapat digunakan untuk mengukur ketepatan tindakan dalam manajemen bencana dan akan membuka peluang intervensi-intervensi lain dalam sektor non pendidikan (kesehatan, hukum dan perlindungan anak serta lingkungan hidup), kegiatan ini harus selalu digalakkan guna menyiapkan diri supaya kita lebih siap dan aktif dalam merespon bencana yang bisa saja terjadi (Carter, W. Nick., 2010)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan pengetahuan baik dari hasil *pre test* 4 orang (16,00%) meningkat menjadi 23 orang (92,00%) setelah diberikan edukasi tentang pentingnya pengetahuan pemenuhan hak dasar balita dalam situasi darurat bencana kebakaran. Pihak pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan lintas sektor terutama BNPB dan Puskesmas setempat agar mencegah adanya korban jika terjadi bencana kebakar.

## **PENGAKUAN**

Terimakasih kepada tim pengabdian kepada masyarakat, Kepala Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar, Kepala BNPB Kota Makassar, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar dan masyarakat yang telah berpartisipasi atas terlaksananya kegiatan ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Barnard, I. Chester. 2012. Organisasi dan Manajemen Struktur, Perilaku dan Proses. Jakarta: Gramedia. Cambel, JP. 1989. Riset Dalam Efektivitas Organisasi, terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Erlangga.
- Carter, W. Nick. 2010. A Disaster Manager's Handbook. Manila: Asian Development Bank.
- Dunn, William. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- G. Bankoff, G. Frerks, D. Hilhorst. 2013. Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People. (eds.) (21 November 2003) ISBN ISBN 1-85383- 964-7.
- Glover, David, Timothy Jessup. 2012. Mahalnya Harga Sebuah Bencana. Bandung: Penerbit ITB.
- Haryanto, Agus Joko. 2012. Manajemen Bencana dalam Menghadapi Ancaman Bencana Industri di PT Lautan Otsuka Chemical Cilegon. Thesis. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Universitas Indonesia.
- Hidayat, Bambang. 2020. Bencana Mengancam Indonesia. Jakarta: Kompas Pan American Health Organization. tt. Natural Disaster: Protecting The Public's Health. Jakarta: EGC.
- Kamadhis. 2017. Eka-Cita Bersatu dalam Dharma. Buletin Kamadhis UGM Nomor. XXVII/ September/2017, Yogyakarta.
- Moe, Tun Lin, Pathranarakul P. 2016. An Integrated Approach to Natural Disaster Management. Disaster Prevention and Management Journal . Vol. 15 No. 3. 2006. hal. 396-413.
- P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. UNISDR. 2019. UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, United Nations: Jeneva p. 9. Internet Bappenas: Kerugian Bencana di Indonesia Capai Rp 162 Triliun, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/09/193100726/Bappenas>.

- Setiono, Kusdwiratri, Johan S. Masjur, Anna Alisyahbana. 2017. Manusia, Kesehatan dan Lingkungan. Bandung: PT Alumni. Anih Sri Suryani, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Kesehatan Lingkungan
- Soemirat, Juli. 2018. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryani. Anih Sri. 2012. Upaya Penanggulangan Bencana Alam: Suatu Tinjauan Terhadap Kegiatan Kepalangmerahan dalam Perspektif Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan, dalam Buku Masalah Kepalangmerahan Suatu Tinjauan dari Aspek Hukum dan Sosial. A. Muchaddam Fahham (Penyunting). Jakarta:
- Widayatun dan Zainal Fatoni. 2013. Permasalahan Kesehatan Dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. 8 No.1 Tahun 2013 (ISSN 1907-2902).